



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL



**Laporan Kegiatan
Victim Support Service (VSS) Mengenai
Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Korban
October 2008 – 31 August 2009**

Didukung Oleh:



TAF -The Asia Foundation-Timor Leste

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| A. Pendahuluan | 3 |
| B. Justifikasi Proyek | 3 |
| C. Kegiatan <i>versus</i> tujuan program | |
| 1. <i>Menyediakan Kualitas Pelayanan Hukum bagi Korban yang membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender akses ke sistem peradilan formal.....</i> | 4 |
| 2. Peningkatan Pemahaman Publik terhadap VSS dan hak-hak korban..... | 4 |
| 3. Penguatan Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender | 6 |
| 4. Membangun sebuah jaringan organisasi di antara penyedia dukungan bagi korban perempuan kekerasan berbasis gender..... | 9 |
| 5. Untuk melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan masalah-masalah yang dialami korban kekerasan berbasis gender11 | |
| 6. Mengembangkan kemampuan staf VSS untuk memberikan pelayanan hukum yang professional dan secara independent mengatur programnya..... | 12 |
| D. Statistik..... | 13 |
| E. Tingkat Pencapaian..... | 16 |
| F. Kata penutup..... | 20 |
| G. Pendanaan dan Keuangan | 20 |

A Pendahuluan

Kegiatan Bantuan Hukum yang disediakan oleh Victim Support Service (VSS) adalah sebagai sebuah terobosan kreatif dengan dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa upaya ini akan memungkinkan para korban secara mudah dapat berinteraksi dengan system hukum formal yang sangat asing dengan kehidupan mereka. Para korban kekerasan berbasis jender (yang umumnya adalah perempuan dan anak perempuan) lazimnya dihadapkan pada situasi yang sangat sulit bahkan cenderung mereviktimisasi para korban dalam setiap tahapan proses hukum formal itu sendiri. Selain sebagai korban kekerasan, mereka juga menjadi korban dari ketidaksensitifan system hukum dan para penegaknya. Sistem hukum yang cenderung kaku dan tidak berpihak pada pengalaman kekerasan yang dialami para korban menjadi daftar kontribusi untuk menjadikan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi korban berlipat-ganda ketika mereka memutuskan untuk membawa kasusnya ke pengadilan.

Lemahnya sistem hukum, tidak efektifnya administrasi sistem peradilan formal, terbatasnya sumber daya manusia (terutama aktor pengadilan nasional), minimnya skil dan profesionalisme polisi untuk melakukan investigasi kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan kurangnya sumber hukum materil dan formal yang memadai, menjadikan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender akan terus sangat rentan terhadap kekerasan. Proses hukum yang diharapkan untuk memulihkan hak-hak mereka masih terus jauh dari kenyataan. Perempuan dan anak-anak memperoleh segala macam tindakan kekerasan seperti kekerasan rumah tangga dengan segala konsekuensinya, permerkosaan, incest, pelecehan seksual dan bentuk kejahatan seksual lain termasuk penelantaran, menjadikan kehidupan perempuan serba dilematis dan tidak terbayangkan penderitaan yang mereka alami.

VSS bertindak sebagai penghubung dan menyediakan perwakilan non litigasi untuk mendukung kepentingan terbaik mereka ketika mereka memutuskan untuk menyerahkan kasus mereka ke sistem peradilan formal. Akan tetapi, VSS tidak dapat menjawab masalah-masalah yang ada di luar dari mandat dan kemampuannya. Meskipun demikian, VSS memiliki komitmen yang berlanjut untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal kualitas bantuan hukum untuk menjamin kepekaan, keadilan dan kredibilitas dari proses hukum. VSS yakin bahwa proses ini bukanlah akhir. Singkatnya, untuk mencapai hasil yang diinginkan, proses ini harus berlanjut untuk periode yang lama dengan komitmen ekstra dan didukung oleh sistem yang lebih responsive.

Laporan ini akan menguraikan kegiatan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh VSS selama periode grant yang didanai oleh The Asia Foundation pada bulan October 2008-31 Agustus 2009. Dalam laporan ini juga akan mengetengahkan informasi mengenai daftar statistik kasus VSS selama periode grant ini berlangsung, termasuk kegiatan peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban dalam system hukum formal, kerjasama dan dukungan terhadap institusi Kepolisian Nasional Timor Leste khususnya dengan Departemen Investigasi-Unit Orang Rentan (VPU) dan kantor

kejaksaan distrik di masing-masing wilayah yurisdiksional dan kegiatan advokasi, kampanye dan jaringan yang dilakukan oleh VSS bersama dengan NGO lainnya.

VSS merasa sangat berterima kasih kepada semua pihak terutama, TAF selaku donor yang mendanai kegiatan bantuan hukum kepada para korban kekerasan berbasis gender. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan mereka untuk memberikan akses dan kesempatan kepada VSS melalui kerjasama, diantaranya Komandan Kepolisian di 13 distrik yang tersebar di Timor Leste, para Jaksa Penuntut Umum di masing-masing wilayah yurisdiksional, para organisasi partner penyedia layanan dukungan terhadap korban seperti Fokupers dan Pradet, Lembaga Bantuna Hukum (LBH) di beberapa distrik, Sekretaris Negara Untuk Urusaun Promosi Kesetaraan dan Gender (SEPI) dan yang lainnya.

B. Justifikasi Proyek

The Victim Support Service (VSS) didirikan pada bulan April 2005 dengan bantuan dana dari UNFPA, untuk meningkatkan akses ke keadilan bagi korban perempuan dan anak kekerasan berbasis gender. VSS berdiri sebagai sebuah unit dalam program pemantauan sistem yudisial (JSMP), dan pada saat ini mempekerjakan enam orang pengacara dan satu orang staf keuangan. Sejak didirikannya, VSS telah membantu 467 korban kekerasan berbasis gender (terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual) dengan mendampingi klien ke stasiun Polisi, kantor Kejaksaan dan Pengadilan, memberikan bantuan praktis seperti makanan dan transportasi, membantu klien untuk memahami proses hukum, peranan aktor pengadilan dan keputusan pengadilan.

Pada setiap tahapan proses hukum, VSS bekerja dengan tujuan untuk menjamin bahwa sistem hukum lebih menghormati dan sensitif terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. VSS bekerja dengan enam tujuan program kerja utama yang akan dijelaskan dalam bagian berikut di bawah ini. Berdasarkan tujuan ini, VSS mencoba untuk menjamin bahwa korban perempuan dan anak kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual memahami hak-hak mereka sebagai korban, meyakinkan mereka untuk merujuk kasus mereka ke sistem peradilan formal. Pada setiap tahap proses hukum, VSS bekerja dengan tujuan untuk menjamin bahwa sistem hukum lebih menghargai dan sensitif terhadap perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan.

Kegiatan yang disebutkan di atas dicapai melalui penyediaan bantuan hukum yang berkualitas termasuk bantuan praktis seperti transportasi, makanan dan tempat penginapan sementara, mendampingi mereka dari dan ke polisi ketika kasus mereka dilaporkan hingga penyelesaian di tingkat pengadilan, merujuk ke penyedia layanan yang tepat dan mengorganisir pelatihan mengenai penyadaran hukum berperspektif korban kelompok masyarakat baik di kota maupun di pedalaman. VSS juga bekerja untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan VSS, hak-hak korban, peranan dan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan formal dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender melalui produksi dan distribusi poster, brosur, tas dan stiker dan terlibat dalam beberapa program radio dan TV yang diorganisir

oleh Unit Outreach JSMP dan organisasi lain melalui partisipasi dalam diskusi, pelatihan, kerjasama dalam advokasi kasus dan prosesnya. Sejak didirikan pada tahun 2005, VSS telah mengembangkan dan bekerja secara dekat dengan Unit Orang Rentan (VPU) di kedua yurisdiksi pengadilan Distrik Baucau dan Dili, yang meliputi Dili, Ermera, Aileu, Liquiça, Mantuto, Baucau, Viqueque dan Lospalos. VSS juga telah membangun kerjasama yang baik dengan Kantor Kejaksaan, mendukung institusi-institusi ini dalam hal investigasi dan penuntutan kekerasan berbasis gender dan menjamin bahwa hak-hak korban dihormati.

Melalui dukungan dana dari TAF pada bulan Oktober 2008, telah membantu VSS untuk melanjutkan program kerjanya dan melanjutkan kegiatan pelayanan bantuan dan nasihat hukum yang berkualitas kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender yang telah didijalankan selama ini. Melalui dukungan financial ini juga, telah membantu VSS untuk merekrut dua orang pengacara tambahan untuk ditempatkan pada masing-masing Jurisdiksi Pengadilan Distrik di Suai dan Oecusse.

C. Kegiatan versus tujuan program:

Tujuan 1: Menyediakan Kualitas Pelayanan Hukum bagi Korban yang membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender akses ke sistem peradilan formal;

Selama periode grant ini, VSS telah memberikan bantuan hukum kepada sekitar 152 korban kekerasan berbasis gender (terhitung dari bulan Oktober 2008 hingga pertengahan Agustus 2009). Bantuan hukum inisial kepada korban termasuk: (a) menjelaskan kepada korban mengenai hak-hak hukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor-Leste, standar hukum internasional dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Timor Leste; (b) mendorong dan memberikan motivasi kepada korban perempuan kekerasan berbasis gender untuk mengakses ke sistem peradilan formal, (c) menjelaskan kepada korban/klien mengenai hak-hak mereka sebagai korban pada setiap tahapan proses sistem peradilan formal(d) mendorong mereka untuk konsisten dengan informasi/pernyataan mereka yang telah mereka berikan di kantor kepolisian; dan menjamin bahwa klien tidak menarik kembali kasus mereka dari sistem peradilan formal (e) menjelaskan kepada klien mengenai dampak positif dan negatif mengenai proses kasus kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual di sistem peradilan formal, termasuk putusan pengadilan.

Jika korban membutuhkan bantuan tambahan yang tidak tersedia dalam pelayanan VSS, VSS akan: (f) membantu klien mencari pilihan alternatif untuk menyelesaikan kasus mereka dengan merujuk klien ke penyedia layanan lain untuk menerima bantuan dukungan tambahan seperti dukungan psikologis, bimbingan dan rehabilitasi mental, pemeriksaan medis dan tempat tinggal sementara dan pelayanan akomodasi jika korban merasa tidak aman untuk kembali ke rumahnya untuk sementara

Tujuan 2: Peningkatan Pemahaman Publik terhadap VSS dan hak-hak korban

Untuk memastikan hak-hak korban ditempatkan secara proporsional, maka kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban adalah bagian terpenting dalam usaha untuk meningkatkan akses korban perempuan dan anak dalam menyelesaikan kasus mereka lewat sistem peradilan formal. Selama pengalaman VSS ketika mendampingi korban, VSS mencatat bahwa terdapat kecenderungan bahwa dalam penegakkan hukum, pandangan publik, perilaku, persepsi dan pemahaman termasuk penegak hukum (struktur legal), seringkali tidak menempatkan korban sebagai faktor penentu dalam mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Korban selalu dianggap sebagai pelengkap dari tuntutan kebutuhan sistem peradilan formal dan lazimnya korban hanya ditempatkan sebagai pembantu kejaksaaan dalam sistem peradilan formal¹. Ketentuan ini dapat dijustifikasi di alinea ketiga dari pembukaan dalam hukum acara Timor Leste dan secara khusus diatur dalam Pasal 72 hukum acara ini.

Untuk merespon realitas yang disebutkan di atas, VSS terus meningkatkan pemahaman akan hak-hak perempuan dan pelayanan VSS kepada masyarakat lewat pendidikan dan promosi seperti poster, brosur, tas, program radio dan televisi dan pelatihan atau lokakarya. Dalam periode grant ini, secara khususnya VSS telah: merancang, memproduksi dan mendistribusikan material informasional berupa kalender bermotif poster sebanyak seribu lima ratus exemplar mengenai akses ke sistem peradilan formal melalui dukungan VSS. Informasi lain yang terkandung dalam kalender ini antara lain meliputi pesan kunci atau informasi kunci dengan kepentingan dan makna intensional untuk mengajak dan menghimbau publik atau masyarakat pada umumnya, terutama para penegak hukum untuk menghargai suara korban atau keterangan dan kesaksian korban sebagai elemen terpenting dalam mengungkap kebenaran dan keadilan. Pesan ini dengan maksud untuk menempatkan kehadiran dan keterlibatan korban sebagai unsur/element sentral dalam pengungkapan fakta-fakta hukum dalam mencapai keadilan dalam sebuah perkara pidana.

Poster bermotif Kalender tersebut telah didistribusikan baik di Dili maupun di distrik dimana VSS berkerja; termasuk kelompok perempuan di distrik, tempat-tempat umum seperti di gedung sekolah, pusat gedung-gedung peradilan seperti; Stasiun kepolisian, kantor kejaksaaan distrik di masing-masing yurisdiksi dan pengadilan distrik.

Selain itu VSS terus secara aktif terlibat dalam kelompok kerja untuk rancangan undang-undang kekerasan domestic yang dipimpin oleh Fokupers bersama organisasi lainnya, sebagai anggota kelompok diskusi dan peyeragaman konsep antara rancangan undang-undang kekerasan domestic dan rancangan hukum pidana Timor Leste (KUHP Timor Leste sekarang); dan terlibat aktif dalam kegiatan diskusi dan seminar di beberapa kesempatan mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan.

¹ Pasal 72 (1) ET-CPC mengatakan bahwa : pihak yang dirugikan, dalam persoalan pidana, mempunyai status sebagai pembantu jaksa penuntut umum dan semua tindakan proseduralnya diserahkan kepada jaksa tersebut berhubungan dengan penyampaian bukti atau permohonan agar tindakan tertentu dilakukan untuk mengungkap kebenaran, tanpa melihat sifat pidana yang bersangkutan

Melalui dukungan dan kerjasama dengan TAF, pada bulan April 2009, VSS dan JSMP menyelenggarakan sebuah pelatihan hukum berperspektif gender dan korban kepada beberapa LBH yang juga merupakan partner TAF namun berbasis di distrik untuk menjalankan program akses ke pengadilan formal.

VSS juga masih terus melanjutkan promosi VSS melalui kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender, kelompok advokasi Undang-Undang Kekerasan Domestik, peningkatan kesadaran public dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan program penghapusan kekerasan berbasis gender.

Selanjutnya, VSS terus mempromosikan pelayanan VSS melalui kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender dengan secara aktif terlibat dalam pertemuan reguler Kelompok Kerja Rujukan (*Referral Pathway Working Group Meeting*), yang diadakan secara reguler di kantor JSMP setiap hari Kamis. Pertemuan ini bertujuan untuk membagi informasi seputar penanganan kasus oleh setiap anggota, mendiskusikan cara untuk menindaklanjuti kasus kekerasan berbasis gender dan melakukan advokasi dengan mengatasmakan korban dengan mengirim surat dan/atau bertemu institusi terkait. Sebagai tambahan, VSS juga telah secara aktif terlibat dan memberikan komentar terhadap rancangan undang-undang kekerasan rumah tangga yang diorganisir oleh Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan (SEPI), Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang diorganisir oleh FORUM TAU MATAN (FTM). VSS juga mengambil bagian sebagai anggota kelompok kerja dari rancangan undang-undang Harta Warisan dari perspektif gender yang difasilitasi dan diorganisir oleh SEPI dan Departemen Legislatif Kementerian Kehakiman.

Tujuan 3: Penguatan Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender

VSS telah membangun hubungan yang sangat baik dengan Unit Orang Rentan di Kepolisian (VPU) yang menangani semua kasus yang melibatkan kekerasan seksual dan/atau kekerasan rumah tangga) di yurisdiksi pengadilan Baucau dan Dili. Hubungan kerja yang baik juga telah dibangun dengan Kantor Kejaksaan Agung (*Office of the General Prosecutor -OGP*). Sebagaimana disebutkan di atas, melalui dukungan dari TAF, VSS kemudian menginisiatif dan membangun kerja sama dengan kepolisian di yurisdiksi pengadilan Suai dan Oecusse.

Tujuan untuk membangun hubungan ini dengan dua institusi ini adalah; untuk membantu polisi dan jaksa dalam hal pengumpulan bukti seperti mengambil gambar luka korban, menyediakan transportasi kepada polisi untuk pergi ke jaksa untuk berinteraksi dengan klien VSS dengan cara-cara yang tepat, sensitif dan terhormat, membantu ke rumah sakit dan pengadilan atau dari dan ke penyedia layanan lainnya dan mendorong petugas polisi VPU untuk melakukan investigasi lanjutan atas kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak kekerasan berbasis gender dan menjamin bahwa kasus-kasus tersebut dibawa ke sektor peradilan formal.

Selanjutnya, VSS juga ingin menyakinkan polisi dan jaksa untuk mempercayai pernyataan dan informasi yang diberikan oleh korban dalam tahap investigasi dan menjamin bahwa korban kekerasan tidak disalahkan pada setiap tahap proses sistem peradilan formal.” Lebih lanjut, VSS ingin klien diberitahu tanggal dan waktu *pra persidangan* dan persidangan. .

Pada setiap tahap proses peradilan formal, VSS sangat berniat untuk menjamin bahwa polisi dan jaksa memahami bahwa korban kejahatan merupakan satu elemen terpenting dari pengadilan. VSS bekerja untuk meningkatkan pemahaman polisi dan jaksa bahwa *“keadilan secara absolut datang dari suara korban dan perlu ditempatkan sebagai “kunci dan figur utama” dalam proses sistem peradilan formal”*.

Untuk mencapai tujuan ini, VSS telah merancang dan mengadakan kunjungan reguler (tiga kali dalam seminggu) ke VPU Distrik Dili, dua kali dalam sebulan ke VPU di pengadilan Distrik Baucau yang antara lain meliputi; Manatuto, Viqueque, Lospalos dan Baucau (kecuali untuk kasus emergensi) dan sekali dalam seminggu ke beberapa VPU di Liquica, Ermera, Aileu yang berada di bawah Yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili.

Kunjungan yang sama juga dilakukan secara teratur ke beberapa VPU yang berbasis di Pengadilan Suai yang meliputi: Distrik District, Manu-fahi, Ainaro and Bobonaro. Sementara untuk VPU, dan mitra lainnya di Jurisdiksi Pengadilan Oecusse kunjungan dilakukan satu kali dalam sebulan, namun sekali kunjungan dapat menghabiskan waktu selama dua minggu berturut-turut di jurisdiksi setempat.

Dukungan di Tingkat Kepolisian;

Dalam tahap ini, VSS menasehati polisi mengenai bagaimana menangani kasus dengan baik dan memberikan VPU salinan KUHAP baru. Untuk menjamin bahwa polisi memahami KUHAP, VSS mencoba untuk membantu dan mendiskusikan dengan polisi untuk memahami cara yang tepat untuk melakukan interpretasi terhadap isi KUHAP. VSS telah membantu petugas polisi untuk bertemu dan mendiskusikan kasus dengan jaksa jika kasus tersebut kelihatan lebih kompleks bagi polisi untuk menyelesaikan proses investigasi mereka.

Dalam beberapa kesempatan, VSS juga membantu para korban dan polisi dengan transpor ke kantor kejaksaan dan VSS juga terlibat dalam proses kordinasi dan mekanisme untuk mengunjungi korban yang tidak mampu membawa kasus mereka..

Hubungan antara VSS dan Polisi Nasional Timor Leste terus dikonsolidasi melalui mengupdate pelayanan VSS kepada Polisi Polisi Nasional Timor Leste yang baru direkrut dan mendiskusikan dengan polisi bagaimana menangani dan menginvestigasi korban kekerasan berbasis gender dengan cara-cara sensitif dan terhormat.

.Atu hametin relasaun servisu ne’ebe metin liu entre VSS ho VPU, VSS halao vizita regularmente semana rua dala ida ba VPU sira iha Jurisdisaun Tribunal Distrital Baucau no dala ida kada semana ba distritu sira iha ne’ebe submete ba Jurisdisaun Tribunal

Distrital Dili. VSS sei halao vizita emerjensia atu responde ba kazu ne'ebe kategoria emerjensia. Maibe, VSS mos hetan impedementu tanba limitasaun transportasaun

Dukungan di tingkat kejaksaan dan pengadilan

VSS secara aktif telah melakukan komunikasi dengan aktor yudisial, terlebih polisi dan jaksa, untuk menjamin mereka memahami, mempertimbangkan dan menerima hak korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. VSS juga bekerja untuk melakukan pendekatan terhadap semua aktor pengadilan untuk memberikan perhatian serius terhadap korban kekerasan berbasis gender selama proses peradilan formal. Selanjutnya, VSS mengadakan diskusi informal dengan jaksa mengenai cara-cara yang lebih sensitif, dan pentingnyapenuntutan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dan penyerangan seksual sebagai kasus utama dalam pengadilan.

Untuk keadaan atau sirkunstasi tertentu, dalam realitasnya, VSS masih terus mengadakan diskusi sehubungan dengan investigasi kasus baru dan menindak lanjuti kasus lama yang sudah berada dalam lingkungan system hukum formal, bersama-sama dengan jaksa menjelaskan putusan termasuk dampak dari sebuah putusan kepada korban, dan dalam keadaan tertentu memfasilitasi korban untuk bertemu dengan jaksa dan melobi jaksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tujuan 4: Membangun sebuah jaringan organisasi di antara penyedia dukungan bagi korban perempuan kekerasan berbasis gender;

Sejak dirikannya sampai sekarang, VSS telah mengembangkan hubungan baik dan kordinasi dengan organisasi lain yang juga bekerja untuk membantu korban kekerasan berbasis gender. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan, kerjasama dalam kasus klien dan, memberikan kontribusi kepada masing-masing program pelatihan dan pendidikan masyarakat. Organisasi partner VSS termasuk, Pradet, Fokupers, Rede Feto, Alola Foundation, Perkumpulan HAK, AMKV (*Asosiasaun Mane Kontra Violencia*.), Asosiasi Pengacara Timor Leste, lembaga bantuan hukum lokal, institusi kesusteran, agen-agen internasional seperti UNICEF, UNIFEM, UNFPA (sebagai donor dan mitra jaringan kerja), Caritas Australia dan Pengacara Tanpa Batas (*Lawyers without Border -ASF*) serta IOM. VSS juga memiliki kordinasi baik dengan institusi-institusi pemerintah seperti SEPI dan Direktorat Nasional untuk Pelayanan Sosial (DNSS).

Hubungan ini ditandai dengan undangan yang diberikan kepada VSS untuk menghadiri pertemuan, diskusi reguler mengenai masalah-masalah yang dihadapi perempuan, fasilitasi pelatihan hukum mengenai perspektif gender dan advokasi bersama terhadap kasus-kasus.

VSS terus meningkatkan pelayanannya melalui keterlibatannya dalam kelompok kerja pencegahan kekerasan berbasis gender dengan secara aktif terlibat dalam Pertemuan Kelompok Kerja Rujukan yang telah dilaksanakan secara reguler di kantor JSMP pada setiap hari Kamis. Tujuannya adalah untuk membagi informasi mengenai penanganan

kasus oleh masing-masing anggota, mendiskusikan cara menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan melakukan advokasi atas nama klien dengan mengirim surat atau/dan bertemu dengan institusi terkait. Lebih lanjut, VSS juga terlibat dalam memberikan komentar terhadap rancangan undang-undang kekerasan rumah tangga, yang diorganisir oleh Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan (SEPI), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi, Undang-Undang Anak yang diorganisir oleh Forum Tau Matan (FTM), VSS juga mengambil bagian sebagai anggota kelompok kerja rancangan undang-undang harta warisan yang difasilitasi dan diorganisir dari SEPI dan Departemen Legislatif Kementerian Kehakiman.

Sejak September 2008 hingga saat ini, VSS dengan aktif terlibat dalam kelompok kerja undang-undang kekerasan rumah tangga untuk mendiskusikan dan memberikan komentar dan rekomendasi mengenai pasal-pasal khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah kekerasan berbasis gender untuk disesuaikan dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah lolos dan disahkan oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste pada bulan Maret tahun ini. Rekomendasi dan komentar tersebut dimasukkan melalui Departemen Perundang-undangan Menteri Kehakiman dan telah dipertimbangkan.

Keterlibatan VSS dengan organisasi mitra lainnya

Program peningkatan peyadaran pemahaman publik mengenai hak-hak korban bersama dengan kehadiran VSS di sistem peradilan formal bermaksud untuk memfasilitasi akses korban perempuan kekerasan rumah tangga dan seksual ke sistem peradilan formal, sehingga mereka dapat menggunakan sistem ini untuk menyelesaikan kasus mereka. Kegiatan ini diorganisir bersama dengan Unit Keadilan Perempuan JSMP, Fokupers, Alola Foundation dan IOM.

Lebih lanjut, VSS telah menjadi partner permanen dari Fokupers dan telah dilibatkan secara regular dalam kegiatan radio mengenai pendekatan hukum berperspektif jender. VSS telah diundang beberapa kali untuk memfasilitasi diskusi mengenai peningkatan kesadaran publik mengenai kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak korban dalam hukum yang berlaku dan akses ke sistem peradilan formal di beberapa distrik atau wilayah tertentu yang menjadi basis kerja Fokupers.

VSS telah dan akan terus terlibat dalam diskusi dan lokakarya seputar masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan yang diorganisir oleh Fokupers, Rede Feto, Caucus dan Alola Foundation.

Karena keaktifan VSS dalam membangun hubungan kemitraan dengan organisasi lainnya dalam rangka memerangi dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan ketrampilan hukum yang dimiliki VSS maka pada bulan Maret 2009 VSS mendatangi sebuah kerjasama dengan Alola Foundation untuk menyediakan pelatihan dan informasi hukum untuk kelompok dampingan mereka di beberapa distrik seperti di; Aileu, Ainaro, Manufahi, Maliana/Bobonaro, Suai, Oecusse dan Atauro. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dirintis pada tahun 2008. Materi pelatihan yang dibawakan meliputi hak-hak korban dalam sistem peradilan formal, perbedaan atas kasus pidana dan perdata, peran dan fungsi para aktor judisial dan akses ke peradilan formal

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kerjasama sejenis juga dilakukan dengan Agensi IOM untuk memfasilitasi pelatihan hukum kepada kelompok masyarakat di empat aledia di Beto Barat, Comoro-Dili pada pertengahan tahun 2009.

Selama tahun ini, VSS juga terlibat sebagai team fasilitator dalam menghimpun data dan analisis informasi dalam proses penulisan laporan alternatif mengenai CEDAW dari LSM, yang diorganisir oleh Rede Feto dan Caucus sebagai pantia pelaksana. VSS dipercaya untuk menjadi fasilitator akan isu tematik mengenai hukum, pencari kerja dan politik.

Untuk memastikan kehadiran VSS selaku penyedia dukungan, VSS merancang program kunjungan regular ke VPU di semua distrik dan ke kantor kejaksaan distrik di masing-masing yurisdiksional. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih efektif dan solid, VSS juga sering melibatkan jaksa dan polisi dalam kegiatan penyebarluasan informasi dan pelatihan hukum.

Tujuan 5: Untuk melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan masalah-masalah yang dialami korban kekerasan berbasis gender

Untuk mencapai tujuan ini kegiatan-kegiatan terkait yang dilakukan adalah termasuk: bertindak atas nama korban dan/atau anggota keluarga korban untuk menyurati institusi terkait seperti polisi dan jaksa atau institusi terkait lainnya dan melakukan advokasi akan hak-hak korban dengan merujuknya pada konvensi internasional yang relevan yang telah diratifikasi oleh Timor Leste atau mendiskusikan interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang Timor Leste. Sebagai contoh konkrit dari upaya ini, pada akhir Maret 2009, VSS menyurati Kantor Kejaksaan Distrik Baucau atas kasus kekerasan domestik yang didampingi VSS pada Jurisdiksi setempat. VSS melayangkan surat ke kejaksaan dan menemui hakim dalam kasus ini karena merasa sangat prihatin dengan putusan pengadilan atas kekerasan domestik serius karena membebaskan terdakwa dari tanggung jawab hukum.

Selain itu VSS terus memupuk kerjasama dengan badan relevan lainnya untuk menegakkan hak-hak korban untuk melakukan advokasi terhadap masalah-masalah yang diakibatkan oleh kekerasan berbasis gender

VSS juga akan terus berusaha untuk melibatkan media dalam proses kampanye dan advokasi terhadap masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan melalui program radio dan TV dan menerbitkan/meluncurkan laporan tahunan VSS pada akhir project grant atau pada saat projek grant sedang berlangsung.

Terlibat dalam proses melakukan kampanye mengenai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan kepada anggota dewan desa, kampung dan kelompok pemuda yang tertarik untuk mengikuti lokakarya yang berjudul Kekerasan terhadap Perempuan. Kepala desa yang dikunjungi oleh VSS dalam serangkaian diskusi tindak lanjut mengenai peningkatan pemahaman masyarakat telah menunjukkan komitmen mereka untuk menghapus semua kekerasan terhadap perempuan.

VSS juga masih terlibat secara aktif dalam team lobi dan advokasi atas rancangan undang-undang kekerasan domestik dengan perhatian khusus bersama dengan (kolaborasi) dengan semua komponen masyarakat sipil lainnya. Secara eksplisit beberapa usulan dan rekomendasi sudah ditampung oleh para anggota menteri juga merupakan anggota dewan menteri yang mempunyai pengaruh dalam menyampaikan suara selama diskusi dan untuk segala kebijakan nasional apapun.

Selain kegiatan eventual semacam itu, VSS juga setiap tahun, secara khusus pada bulan November dan Desember tahun sebelumnya, VSS secara aktif terlibat dalam kampanye 16 hari kegiatan penghapusan kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara regular di Negara ini. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan FOKUPERS, PDHJ Bagian Jender, dan Pradet melakukan diskusi dan sosialisasi mengenai rancangan Undang-undang kekerasan domestik di Ermera, Maliana, Suai dan Aileu.

Tujuan 6: Mengembangkan kemampuan staf VSS untuk memberikan pelayanan hukum yang professional dan secara independent mengatur programnya

Pengembangan kemampuan staf merupakan aspek terpenting untuk kepentingan jangka panjang dari institusi yang akan membantu mencapai hasil-hasil yang diinginkan dan mempertahankan kelanjutan program organisasi. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan institusi ini, institusi itu sendiri bertanggungjawab untuk menyiapkan kondisi yang memungkinkan staff dapat mengembangkan dan membekali diri mereka, juga bertanggungjawab untuk menjalankan kegiatan institusi.

Dengan merujuk pada tujuan-tujuan ini, ada beberapa solusi alternatif, termasuk keterlibatan staf dalam kegiatan pelatihan yang diorganisir oleh organisasi nasional lain atau organisasi regional. Akan tetapi, hal ini akan menjadi sulit bagi VSS karena keterbatasan sumber pendanaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dari staf, perlu membangun kemampuan mereka sehingga dapat memiliki keahlian dan profesionalisme dalam hal memberikan pelayanan bantuan hukum dalam konteks manajemen dan mengimplementasikan kegiatan. Pelatihan yang direncanakan meliputi keahlian yang ada kaitannya dengan melakukan hubungan dengan donor, mengidentifikasi donor baru, meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan argumen-argumen persuasif dengan cara-cara professional dengan aktor pengadilan yang bukan orang Timor Leste, dan kursus Bahasa Inggris dan Portuguese.

Selain itu, staf VSS dapat berpartisipasi dalam pelatihan lain yang diberikan secara cuma-cuma seperti pelatihan yang diorganisir oleh Asosiasi Pengacara Timor Leste dan organisasi mitra lainnya. Staf VSS juga memiliki kesempatan untuk menghadiri sebuah pelatihan yang diorganisir di luar Negeri..

D. Statistik²

Statistik di bawah ini mencerminkan jumlah klien yang dibantu oleh VSS selama periode proyek (antara bulan October 2008-Agustus 2009). Karena proyek ini hanya terfokus pada penyediaan layanan bantuan hukum kepada perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis gender, oleh karena itu para klien yang dibantu oleh VSS kesemuanya adalah perempuan dan anak-anak yang telah menjadi Korban kekerasan yang berkarakter atau berbasis gender.

Statistik berikut ini menunjukkan jumlah klien yang dibantu oleh VSS per bulan, sumber rujukan, tingkat pendidikan, umur dan status perkawinan, juga rincian mengenai tipe kasus dan presentasi kasus yang diproses lewat sektor peradilan formal lewat kontribusi dan dukungan VSS.

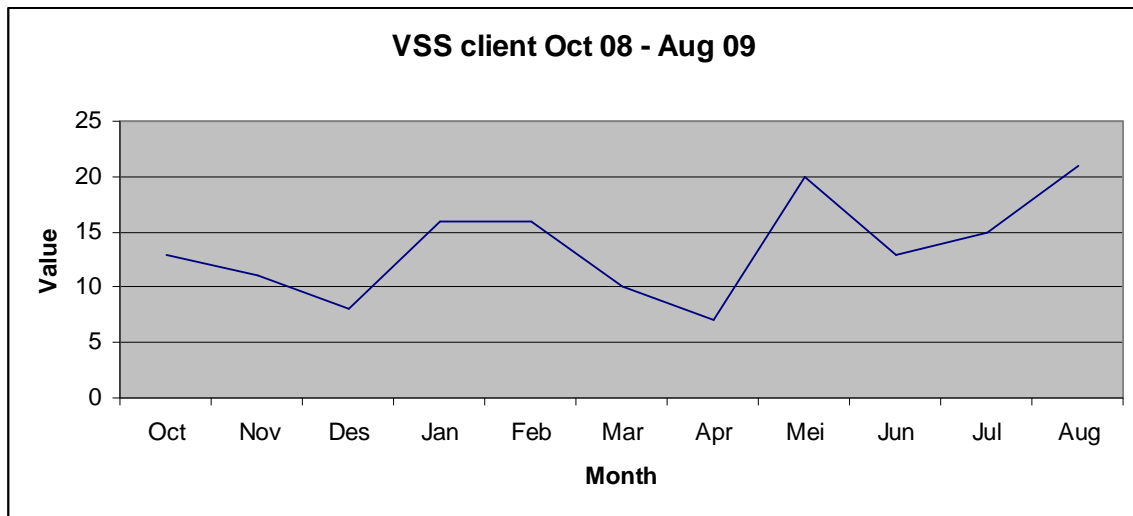


Table 1 Klien VSS Berdasarkan Sumber Rujukan dari Dili dan Distrik

² Statistik ini hanya membahas jumlah klien VSS adalah perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis gender.

| Sumber rujukan | Dili | Ail | Erm | Liq | Bauc | Manatutu | Viq | Los | Suai | Bobonaro | Same | Ainaro | Oecusi | Grand total |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Fokupers | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Lain-Lain | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| Polisi | 14 | 2 | 14 | 10 | 9 | 6 | 17 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 124 |
| Pradet | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Datang Sendiri | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 9 |
| Total | 36 | 3 | 15 | 10 | 11 | 6 | 17 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 8 | 152 |

Table 2 Klien VSS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Total | Persentasi |
|--------------------|------------|-------------|
| Tidak ke Sekolah | 40 | 26% |
| Tidak diketahui | 72 | 48% |
| Sekolah Dasar | 11 | 7% |
| SMP | 20 | 20% |
| SMA | 6 | 6% |
| Universitas | | 0% |
| Grand Total | 152 | 100% |

Table 3 Klien Berdasarkan Umur

| Kelompok Umur Klien | Total | Persentasi |
|---------------------|------------|-------------|
| <5 | 5 | 3 % |
| >35 | 20 | 13 % |
| 05-12 | 15 | 10 % |
| 13-17 | 35 | 23% |
| 18-25 | 38 | 26 % |
| 26-35 | 37 | 24 % |
| Don't know | 2 | 1 % |
| Grand Total | 152 | 100% |

Table 4 Klien VSS Menurut Status Perkawinan

| Status Perkawinan | Total | Persentasi |
|--------------------|------------|-------------|
| Kawin | 84 | 56% |
| Belum Kawin | 64 | 42% |
| Berpisah / Cerai | 2 | 1 % |
| Janda | 2 | 1 % |
| Grand Total | 152 | 100% |

Statistik Berdasarkan Kejadian

Dari kasus yang dirujuk ke VSS selama Oktober 08 - Aug 09, 48% (73) adalah kasus kekerasan seksual, 48% (73) adalah kasus kekerasan domestic / Penganiayaan fisik , 4% (6) penelantaran . Sementara 49 % dari kasus tersebut melibatkan anak-anak, sementara selebihnya 51 % kasus melibatkan perempuan dewasa..

Figure 1 Tipe Kekerasan Seksual Menurut Insiden

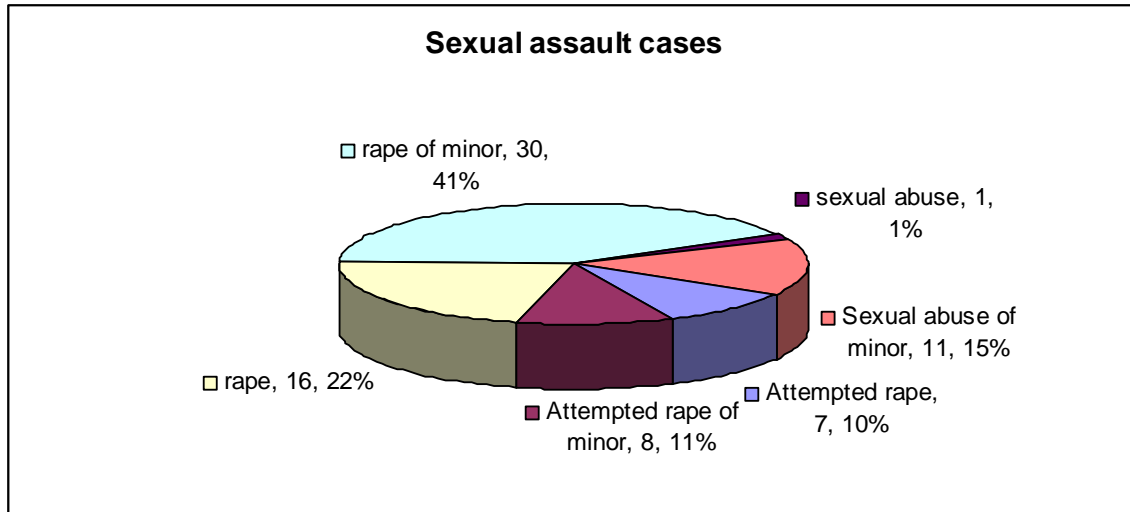


Table 6 Perkembangan Kasus

| Status | Total | Persentasi |
|----------------------------|-------|------------|
| Ditarik Kembali/Mediasi | 6 | 4 % |
| Tingkat Kepolisian | 15 | 10 % |
| Kantor Kejaksaan | 120 | 79 % |
| Pengadilan | 5 | 3 % |
| Diputuskan Oleh Pengadilan | 2 | 1 % |
| Dirujuk ke Pengacara Umum | 04 | 3 % |
| Grand Total | 152 | 100% |

E. Hasil/Pencapaian

Menyediakan kualitas layanan hukum bagi korban yang membantu perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan berbasis gender untuk mengakses ke sistem peradilan formal;

Sebagaimana disebutkan di atas, selama periode grant in berjalan, terdapat 152 klien yang menggunakan ketrampilna bantuan hukum yang disediakan oleh VSS. Meskipun, tidak banyak klien yang datang langsung ke VSS untuk melapor kasus mereka, akan tetapi kasus yang dirujuk dari mitra VSS meningkat secara signifikan. Mereka menghubungi VSS melalui telpon untuk bertemu dengan VSS. Dalam beberapa kasus, mereka juga memperoleh pelayanan VSS melalui keluarganya atau keluarga terdekat yang mengetahui pelayanan VSS. Kasus-kasus lain diterima dari mitra rujukan diantaranya Pradet, Fokupers dan VPU dan ada juga klien yang datang sendiri ke VSS dari masing-masing yurisdiksi seperti yang dijelaskan pada statistik di atas. Total kasus yang dirujuk kepada VSS meningkat secara signifikan dalam konteks membangun kerjasama dengan organisasi lain terutama dari VPU yang memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender di tingkat kepolisian. Nomor kasus rujukan meningkat

secara drastis melalui VPU karena VPU di tiga belas (13) distrik telah dibangun hubungan kerjasama rujukan dengan VSS.

Namun demikian, VSS akan terus merancang rencana untuk melakukan kunjungan secara reguler tiga kali seminggu ke VPU Dili, sekali setiap minggu ke VPU di Jurisdiksi Dili seperti Liquica, Ermeara dan Aileu dan dua kali sebulan ke VPU di beberapa Jurisdiksi di Baucau, Suai dan Oecusse. Akan tetapi karena keterbatasan staf yang dihadapi oleh VSS dan pada saat yang sama staf yang ada sekarang ini selalu diundang oleh organisasi lain untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan diskusi mengenai masalah-masalah perempuan, mengakibatkan VSS tidak konsisten dengan agendanya

Peningkatan Pemahaman Publik terhadap VSS dan hak-hak korban

Menyadari pentingnya kegiatan kampanye penyadaran pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban dan pelayanan VSS, VSS akan terus melakukan kegiatan promosi terhadap hak-hak korban dan pelayanan VSS. VSS percaya bahwa program radio komunitas dan televisi serta produksi material promosi seperti; brosur, poster, tas dan stiker masih perlu ditingkatkan di masa mendatang. Karena proses perubahan pemahaman, kecenderungan perilaku, persepsi masyarakat dan mentalitas tidak dapat dipahami dan dicapai dalam waktu sekali jalan. Semua ini memerlukan dedikasi, komitmen ekstra dan selebihnya memerlukan kesabaran. Akan tetapi, apa saja yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat yang melekat dan dapat diterima sebagai bagian integral (budaya) dari masyarakat.

Namun demikian, kegiatan peningkatan kesadaran publik sedang mengindikasikan dampak yang cukup berpengaruh mengenai kasus yang masuk VSS melalui relasi kerjasama dengan VPU dari tahun-ke tahun. Statistik di atas dapat mendemonstrasikan sebuah justifikasi atas realitas tersebut.

Mengingat kompleksitas masalah yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari pemahaman praktek yang lazim bahkan legal dan kultural, maka solusi dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tidak hanya aspek legal, tetapi VSS berusaha untuk melibatkan semua kalangan masyarakat seperti perwakilan pemuda, gereja dan/atau organisasi anti kekerasan, AMKV untuk terlibat dalam diskusi panel, yang disiarkan lewat program Televisi dan Radio di Dili dan pada level distrik.

Sehubungan dengan upaya peningkatan pemahaman kesadaran publik mengenai pelayanan VSS, maka banyak hal yang harus dilakukan dalam bidang ini. VSS perlu melakukan pendekatan terhadap para struktur pemimpin masyarakat seperti gereja dan kepala desa yang sering diminta bantuan untuk perselisian rumah tangga. VSS telah memulai sebuah program yang disebut Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat untuk bertemu dengan struktur kepemimpinan masyarakat.

Akan tetapi, VSS masih tidak terlalu yakin jika program ini akan membuat mereka untuk secara aktif merujuk kasus-kasus yang muncul di masyarakat karena mereka juga mengeluh akan kurangnya fasilitas dan sumber daya. Oleh karena itu, VSS mengantisipasi masalah ini dengan melakukan kontak reguler dengan mereka. Akan tetapi VSS juga menghadapi kesulitan dalam hal transportasi untuk melakukan

kunjungan berkala ke desa-desa dan kampung-kampung yang menjadi kelompok sasaran VSS.

Penguatan kepolisian dan kejaksaan terhadap kasus kekerasan berbasis gender

VSS telah berhasil dalam mendorong klien untuk merujuk kasus mereka ke sistem hukum formal. Hal ini dapat dijustifikasi melalui 142 klien dari 152 klien yang dirujuk ke VSS selama periode grant ini memilih untuk merujuk kasus mereka ke pengadilan. Meskipun sangat sulit untuk memastikan jika kasus-kasus yang tidak dibawa ke VSS pada akhirnya diselesaikan di pengadilan, namun sudah hampir pasti bahwa mayoritas kasus yang datang melalui VSS memilih untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. VSS mengakui tantangan dan kesulitan lain yang dihadapi oleh sistem peradilan formal sendiri, seperti sumber daya manusia, sistem manajemen kasus yang tidak efektif dan hambatan-hambatan teknis lainnya.

Masalah lain mengenai bagaimana mengakses ke persidangan disebabkan karena pemahaman prinsip hukum secara umum dan hukum acara Timor Leste bahwa kasus kekerasan seksual adalah tertutup untuk masyarakat umum. Lagi pula, Kitab Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste juga mengatakan bahwa pra-persidangan tertutup untuk umum. Hal ini menghambat staf VSS dalam mendampingi klien ketika berhadapan dengan birokrasi prosedur hukum yang begitu ketat dan lambat, meskipun staf VSS telah mencoba untuk menjelaskan kepada aktor pengadilan bahwa VSS memberikan bantuan hukum kepada korban dan VSS telah terlibat secara langsung dari awal.

Membangun jaringan organisasi di antara penyedia dukungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender

Sumber rujukan korban kepada VSS merupakan sebuah indikator yang baik sehubungan dengan bagaimana VSS diterima sebagai sebuah dukungan pelayanan dalam sistem peradilan formal. Selama 2006 dan sampai hari ini, VSS menerima rujukan dari Polisi, Rede Feto, Pradet, Perkumpulan HAK, SEPI, Klinik Bairo Pite, organisasi kesusteran, ECM, ASF dan organisasi internasional lain seperti ASF dan IOM.

Sebagaimana dijelaskan pada sub item "*kegiatan-versuss tujuan program*", VSS telah diterima dan diakui sebagai sebuah unit yang memberikan pelayanan hukum kepada korban kekerasan berbasis gender. Pengakuan ini tidak dapat dilihat dari kepentingan organisasi lain yang menggunakan keahlian hukum dari staf VSS dengan melibatkan VSS dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum dari aspek perempuan seperti merujuk kasus ke VSS, mengundang VSS sebagai fasilitator pelatihan hukum perspektif gender di beberapa distrik, dan terlibat dalam advokasi dan lobi masalah-masalah hukum dan perempuan di peradilan formal di Timor Leste.

Selama periode grant, VSS telah aktif dalam kegiatan Rujukan Kekerasan Berbasis Gender untuk membentuk sebuah rujukan formal bagi korban kekerasan berbasis gender. Pertemuan program rujukan ini secara reguler diadakan setiap hari Kamis, pada jam

10.00-12.30 di ruang pertemuan JSMP. Pertemuan ini untuk meng-*update* kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi, termasuk bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani oleh masing-masing organisasi dan membuat rencana tindak lanjut.

Pengakuan VSS sebagai sebuah dukungan pelayanan dalam sistem peradilan dibuktikan dengan banyaknya jumlah rujukan klien dari Polisi. Terutama, beberapa VPU yang berkedudukan di, Liquica, Ermera, Dili, Viqueque, Suai dan Baucau telah sangat kolaboratif dalam hal mengadakan diskusi terhadap kasus-kasus yang memerlukan keterlibatan kolektif, seperti merujuk kasus ke VSS untuk kasus-kasus yang perlu menetap sementara di sekitar yuridiksi pengadilan. Melalui kehadiran VSS, korban difasilitasi oleh dan untuk tinggal di Selther atau Uma Mahon Fokupers dan Pradet dan seterusnya. . Anggota Polisi di Liquica telah menunjukkan keinginan mereka untuk mendiskusikan instrumen internasional, yang telah diratifikasi dan VSS diminta untuk memberikan instrumen-instrumen ini agar dapat digunakan sebagai referensi dalam penerapan hukum.

Sementara jaksa nasional dan internasional yang baru ingin sekali berkerjasama dengan staf VSS dalam mendiskusikan kasus-kasus klien. Jaksa juga terus menunjukkan kerjasama mereka dengan menghadiri diskusi panel pada program TV dan radio yang diorganisir oleh VSS. Diskusi ini menunjukkan bahwa pihak yudisial mendukung keberadaan dukungan pelayanan korban.

Advokasi dan kampanye mengenai masalah-masalah yang berdampak pada korban kekerasan berbasis gender

VSS telah mencoba secara maksimal untuk menjamin bahwa hak-hak korban kekerasan berbasis gender diterima dan diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan formal. Sebagai wujud nyata dari upaya ini, pengadilan telah mengeluarkan putusan dengan kekuatan hukum tetap untuk dua kasus VSS seratus empat dua kasus yang dirujuk ke sistem peradilan formal melalui dukungan dan arahan dari VSS selama periode grant ini. Sementara, seratus dua puluh dua kasus lainnya masih di kantor kejaksaan, lima belas kasus masih dalam proses investigasi di tingkat kepolisian, empat kasus perdata dirujuk ke kantor pembela umum dan sisanya enam kasus ditarik kembali dari sistem peradilan formal yang diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian tradisional.

Keterlibatan VSS dalam kegiatan advokasi dan kampanye sehubungan dengan kekerasan terhadap perempuan telah dibuktikan melalui sebuah penghargaan oleh kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Timor Leste kepada VSS/JSMP karena dedikasi dan komitmen dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Timor-Leste dan pengembangan perdamaian dan stabilitas pada tanggal 9, March 2009 di UN House Kaikoli Dili.

Sebagai bukti lain dari keterlibatan VSS/JSMP dalam upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, pada 26 Juli 1 Agustus 2009, team JSMP telah ambil bagian dalam perwakilan masyarakat sipil untuk menyampaikan laporan implementasi Konvensi CEDAW convention dari perspektif Masyarakat Sipil di hadapan Komite CEDAW di

New York. Kehadiran JSMP dalam team ini secara langsung dan secara aktif terlibat selaku anggota perancang dan penulis laporan bayangan/laporan alternatif versi masyarakat sipil bersama organisasi perempuan lainnya yang dipimpin oleh Rede Feto.

Sementara dari April-Mei 2008 hingga saat ini, VSS telah terlibat secara aktif dalam melakukan loby dalam team advokasi mengenai rancangan undang-undang kekerasan rumah tangga. Organisasi yang berpartisipasi dalam team ini adalah Fokupers, Caucus, Provedor Direitus Umanus, JSMP' Women Justice Unit, dan beberapa perwakilan dari media adalah RTTL (East Timor Radio and Television) dan Diario Nasional. Team ini mengunjunggi beberapa Kementereian terkait untuk meloby dan melakukan advokasi terhadap rancangan undang-undang kekerasan rumah tangga untuk mempertimbangkan sebagai "kejahatan publik" bukan semi publik seperti yang diharapkan oleh sekelompok orang. Usaha-usaha ini secara implisit menghasilkan tanda yang positif sebab Kementerian Kehakiman Timor Leste dan Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan Gender menerima dan menyetujui dengan poi-poin yang diangkat oleh team loby. VSS tetap berkomitmen dan akan terus bekerja setiap hari dengan polisi, jaksa dan entitas terkait lainnya untuk menjamin bahwa hak-hak korban diprioritaskan pada semua proses peradilan formal.

Mengembangkan kemampuan staff VSS untuk memberikan pelayanan hukum yang professional dan secara independent mengatur programnya

Mencermati realitas sebagaimana diuraikan di atas, secara nyata telah mengindikasikan kemampuan dan keahlian VSS di dalam memanfaatkan pengaruh profesinya dalam rangka penyadaran pemahaman publik mengenai kekerasan berbasis jender. Terdapat beberapa indikasi pencapaian progresif dalam konteks membangun relasi dan melakukan interaksi profesional yang berhubungan dengan para penegak hukum lain. VSS telah banyak belajar dari pengalamannya sendiri untuk menjawab tantangan dan kebutuhan program termasuk menjawab tantangan profesional lainnya yang berhubungan erat dengan bagaimana untuk menyediakan pelayanan hukum yang berkualitas, produktif dan berkelanjutan. Walaupun tetap menyadari keterbatasan yang ada, VSS telah melakukan apa yang bisa untuk memberikan yang terbaik dalam kepentingan klien dan mengatur peoyek yang ada. Meskipun kemampuan dan pengalaman VSS jauh dari idealnya, komitmennya untuk membantu kliennya tidak dapat dipertanyakan. Pengembangan kemampuan, peningkatan keahlian, pengetahuan profesi hukum, kelancaran dalam bahasa Inggris dan Portuguese dan kemampuan untuk secara independen mengatur kegiatan merupakan bidang-bidang utama yang perlu diperhatikan. Team management JSMP bekerjasama dengan kordenator unit untuk mencari solusi dari permasalahan yang menghambat kerja pelayanan hukum kepada korban dan juga kepada masyarakat secara umum.

F. KATA PENUTUP

Mengingat pentingnya kehadiran VSS dan peranannya dalam sistem hukum formal dan untuk masyarakat Timor Leste, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban

kekerasan berbasis gender. Kami akan berterima kasih atas dukungan keuangan selanjutnya dari HIVOS dan donor lain yang masih memperhatikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

G. PENDANAAN DAN KEUANGAN